



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

SEJARAH INDONESIA



KELAS
XI



PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN AWAL INDONESIA
SEJARAH INDONESIA KELAS XI

PENYUSUN

SUMARDIANSYAH PERDANA KUSUMA

DAFTAR ISI

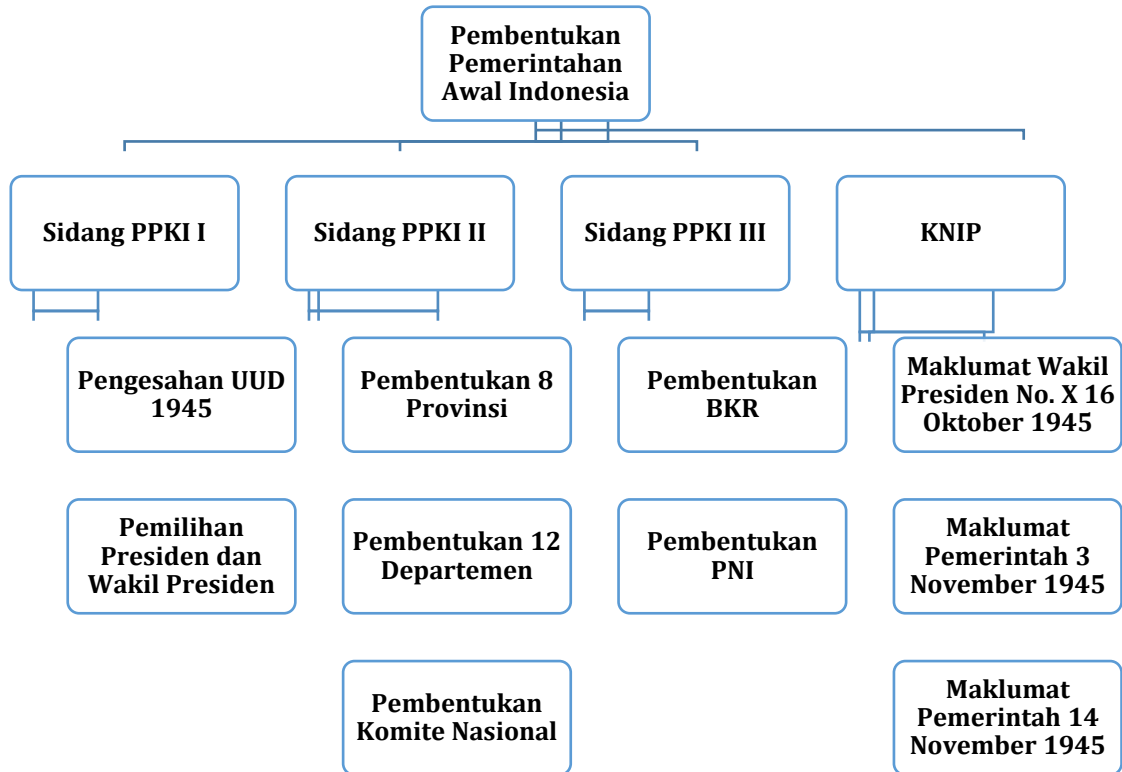
PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
GLOSARIUM	v
PETA KONSEP	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Identitas Modul	1
B. Kompetensi Dasar	1
C. Deskripsi Singkat Materi	1
D. Petunjuk Penggunaan Modul	1
E. Materi Pembelajaran	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1.....	3
SIDANG PPKI I.....	3
A. Tujuan Pembelajaran	3
B. Uraian Materi	3
1. Jepang Berubah Haluan.....	4
2. Pelaksanaan Sidang PPKI I.....	5
C. Rangkuman	9
D. Penugasan Mandiri.....	9
E. Latihan Soal	10
F. Penilaian Diri	13
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2.....	14
SIDANG PPKI II DAN III.....	14
A. Tujuan Pembelajaran	14
B. Uraian Materi	14
1. Sidang PPKI II.....	14
2. Sidang PPKI III	15
C. Rangkuman	16
G. Penugasan Mandiri.....	16
D. Latihan Soal	18
E. Penilaian Diri	20
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3.....	21
KNIP MENATA DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PEMERINTAHAN	21
A. Tujuan Pembelajaran	21
B. Uraian Materi	21

C. Rangkuman	22
D. Penugasan Mandiri.....	22
E. Latihan Soal	23
F. Penilaian Diri	25
EVALUASI.....	26
DAFTAR PUSTAKA	29

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Aklamasi	Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat/sidang terhadap sebuah usul, tanpa melalui pemungutan suara
Chuo Sang In	Dewan pertimbangan yang memberi masukan-masukan kepada pemerintah, serta menjawab berbagai pertanyaan terkait sosial-politik dan menyarankan berbagai tindakan yang dianggap perlu oleh Jepang
Demokrasi	Paham yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan berorientasi pada kepentingan rakyat
Gunseikan	Pemerintahan militer yang dibentuk oleh Jepang
Konstitusi	Seperangkat aturan yang dibuat oleh negara berisikan panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara
Maklumat	Pengumuman yang dikeluarkan oleh otoritas resmi (pemerintah)
PETA	Pasukan Pembela Tanah Air yang dibentuk pada masa Pendudukan Jepang
Proklamasi	Pernyataan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan menjadi Negara berdaulat
Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945 yang disepakati oleh Panitia 9 dalam sidang tanggal 22 Juni 1945
Republik	Konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dibangun dari rakyat dengan Presiden sebagai Kepala Negaranya
Sekutu	Kelompok Negara-negara yang bergabung dalam Blok Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Belanda, dan Rusia dalam konstelasi Perang Dunia II
Sosialis	Paham yang berorientasi pada terpenuhinya kepentingan orang banyak
Status quo	Satu kondisi mempertahankan keadaan/kekuasaan dimasa peralihan dari Jepang kepada Sekutu
Unitaris	Konsepsi mengenai bentuk negara Kesatuan

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas /Semester	: XI / Genap
Alokasi Waktu	: 6 X 45 Menit (3 Pertemuan)
Judul Modul	: Pembentukan Pemerintahan Awal Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- 3.8. Menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini
- 4.8. Menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini membahas mengenai peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Modul ini terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan belajar pertama, disajikan materi pembelajaran tentang “**Sidang PPKI I**”. Lalu pada kegiatan belajar kedua, disajikan materi pembelajaran tentang “**Sidang PPKI II dan III**”. **Kemudian pada kegiatan belajar ketiga, disajikan materi pembelajaran tentang “KNIP”**.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar mandiri yang digunakan oleh guru dan peserta didik, secara pribadi maupun berkelompok dalam kondisi khusus. Penggunaan modul ini bisa dilaksanakan secara daring, luring, atau kombinasi keduanya (*blended learning*) melalui petunjuk sebagai berikut:

1. Bangun komitmen dan kesadaran untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat
2. Baca dan pahami tujuan serta materi yang terdapat dalam modul ini
3. Ikuti seluruh tahapan pembelajaran yang tertulis dalam modul secara cermat dan berkelanjutan
4. Kerjakan semua penugasan atau latihan dalam rangka pencapaian kompetensi
5. Jika ada hambatan dalam belajar bisa segera dikonsultasikan dengan guru atau orang tua

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Sidang PPKI I

Kedua : Sidang PPKI II dan III

Ketiga : KNIP Menata dan Memperkuat Struktur Pemerintahan

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 SIDANG PPKI I

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat melakukan penalaran mengenai situasi Indonesia setelah Proklamasi dan kronologi Sidang PPKI I, kemudian mampu menyajikan hasil penalarannya dalam bentuk lisan/tulisan/media lain.

B. Uraian Materi

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai hasil perjuangan panjang dalam merealisasikan imajinasi atau cita-cita untuk bebas dari belenggu penjajahan. Selain itu kemerdekaan juga tidak lepas dari konstelasi dunia yang ikut berkontribusi melahirkan Indonesia dalam panggung Negara-negara di dunia. Pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 8 dan 9 Agustus 1945, membuat Kaisar Hirohito pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah dan menyerukan penghentian perang melawan Sekutu. Tiga hari setelah itu, tanggal 17 Agustus 1945 kita dihadapkan pada beberapa peristiwa yaitu, jatuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia dan kemenangan Sekutu yang berencana masuk ke Indonesia. Diantara dua peristiwa tersebut, tepat pada hari Jumat, pukul 10.00, tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan Ramadhan, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, segenap rakyat Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Lalu dari proklamasi itulah berdiri Negara Indonesia, yang akan kita bela dan pertahankan kedaulatannya, sampai kapanpun. Mr. Mohammad Yamin pernah mengungkapkan bahwa Negara Indonesia dibentuk diatas asap reruntuhan kekuasaan senjata Jepang dan diatas abu perumahan Kolonial Belanda.



Berita penyerahan Jepang dan Proklamasi Indonesia

Pembentukan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur pun mulai berlaku sejak proklamasi dibacakan. Panduan dalam pembentukan Negara Indonesia secara historis bisa ditelusuri mulai dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Di dalam Piagam Jakarta juga berisikan kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga bisa dikatakan bahwa Piagam Jakartalah yang melahirkan konstitusi dan proklamasi. Negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 mempunyai corak unitarisme, demokrasi, dan sosialisme. Unitaristik, sesuai dengan kalimat proklamasi, yang menyatakan “kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia”, serta sesuai dengan kalimat Piagam Jakarta, yang berbunyi “suatu pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, kemudian selaras dengan Pasal I Konstitusi RI, yang menyebutkan “Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Prinsip-prinsip demokrasi di Negara Republik Indonesia, juga sesuai dengan Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa “kerakyatan dan permusyawaratan” ialah dasar Negara Republik. Kemudian Negara Republik Indonesia juga bercorak sosialisme yang terbatas, karena kalimat pada pembukaan UUD 1945 yang menegaskan “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Lalu dalam Pasal 33 UUD 1945 turut dijelaskan “perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

1. Jepang Berubah Haluan

Satu hari setelah proklamasi didengungkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa sudah dihadapkan pada tuntutan agar segera membentuk pemerintahan di atas Negara yang baru berdaulat. Tanggung jawab ini dijalankan secara kolektif melalui PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI berjumlah 21 orang mewakili unsur Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Peranakan Tionghoa. Selanjutnya Sukarno berinisiatif menambah anggota PPKI menjadi 9 orang tanpa sepengetahuan Jepang, namun 3 orang dari unsur pemuda seperti Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana menolak bergabung, karena masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang.



Gambar Anggota PPKI

No.	Nama	Unsur
1.	Sukarno	Jawa
2.	Mohammad Hatta	Jawa
3.	Supomo	Jawa
4.	KRT. Rajiman Widyodiningrat	Jawa
5.	Raden Panji Suroso	Jawa
6.	Sutarjo Kartohadikusumo	Jawa
7.	K.H. Abdul Wahid Hasyim	Jawa
8.	Ki Bagus Hadikusumo	Jawa
9.	Otto Iskandardinata	Jawa
10.	Abdul Kadir	Jawa
11.	Pangeran Suryohamijoyo	Jawa
12.	Pangeran Purbojo	Jawa
13.	Mohammad Amir	Sumatera
14.	Abdul Abbas	Sumatera
15.	Teuku Mohammad Hasan	Sumatera

No.	Nama	Unsur
16.	Sam Ratulangi	Sulawesi
17.	Andi Pangerang	Sulawesi
18.	A.H. Hamidan	Kalimantan
19.	I Gusti Ketut Puja	Sunda Kecil
20.	Johannes Latuharhary	Maluku
21.	Yap Tjwan Bing	Peranakan Tionghoa
22.	Ahmad Subarjo	Jawa (Tambahan)
23.	Sayuti Melik	Jawa (Tambahan)
24.	Ki Hajar Dewantara	Jawa (Tambahan)
25.	Raden Arya Wiranatakusumah	Jawa (Tambahan)
26.	Kasman Singodimejo	Jawa (Tambahan)
27.	Iwa Kusumasumantri	Jawa (Tambahan)

Daftar Anggota PPKI

Suasana pembentukan pemerintahan awal masih dibawah bayang-bayang tentara Jepang yang masih berjaga-jaga di Indonesia. Ironis, pasca Jepang kalah dari Sekutu, Kolonel Nishimura, ajudan Gunseikan menerangkan kepada Sukarno bahwa Jepang sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, posisi Jepang hanyalah sebagai petugas polisi dari Sekutu. Jepang yang semula berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia justru menjadi berbalik arah tunduk kepada Sekutu untuk menyerahkan Indonesia kepada Sekutu dalam keadaan status quo. Seketika itu juga Gunseikan mengeluarkan perintah yang melarang bangsa Indonesia mengganti pejabat-pejabat sipil atau mengadakan perubahan dalam bentuk apapun juga di pemerintahan, seandainya ada kekacauan terutama dari pemuda, maka Jepang menyatakan tidak segan untuk menembak mereka.

Setelah menyimak materi pembelajaran diatas, kalian harus dapat memahami suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam persiapan membentuk pemerintahan pasca proklamasi dan sikap Jepang yang berubah dari semula simpatik, mendukung kemerdekaan namun seketika berubah menjadi represif!

2. Pelaksanaan Sidang PPKI I

Tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, PPKI mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi. Sebelum sidang dimulai, atas inisiatif Mohammad Hatta dikumpulkanlah beberapa orang seperti Sukarno, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Ahmad Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hasan, untuk mendiskusikan aspirasi dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur, mewakili kelompok non-Islam, bahwasanya mereka berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata pada pembukaan UUD (Piagam Jakarta), yaitu "Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya". Pada akhirnya permasalahan mengenai tujuh kata dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit, dimana ini merupakan suatu pembuktian bahwa para pemimpin-pemimpin kita lebih mementingkan persatuan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam pembukaan sidang PPKI I yang dimulai pukul 11.30 WIB, Sukarno menegaskan agar panitia berkerja secara cepat, abaikan hal kecil, dan fokus pada gagasan-gagasan besar yang mengandung sejarah, seperti penyusunan UUD dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Sukarno juga memberi arahan mengenai

penyusunan UUD, agar bisa mengikuti rancangan yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada sidang ke II, tanggal 10-16 Juli 1945.

Setelahnya, Mohammad Hatta tampil menyampaikan beberapa usulan yang masuk ke panitia untuk dibahas, yaitu mengenai persoalan perubahan pembukaan UUD dan pergantian pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan cita-cita persatuan nasional. Berikut ditampilkan tabel mengenai perubahan pembukaan UUD dan pergantian pasal-pasal pada UUD:

Tabel Pembukaan UUD 1945 Hasil 22 Juni 1945 dan Pembukaan UUD 1945 Hasil 14 Juli 1945

Pembukaan UUD Pada Pembahasan 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta)	Pembukaan UUD Pada Pembahasan 14 Juli 1945
Alinea I Pernyataan Kemerdekaan	
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan	Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
Alinea II Pernyataan Kemerdekaan	
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.	Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea III Pernyataan Kemerdekaan	
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.	Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Alinea IV Mukadimah UUD 1945	
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan	Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka

Pembukaan UUD Pada Pembahasan 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta)	Pembukaan UUD Pada Pembahasan 14 Juli 1945
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel Pembukaan UUD 1945 hasil 18 Agustus 1945

Pembukaan UUD Pada Pembahasan 18 Agustus 1945
Alinea I Pernyataan Kemerdekaan
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
Alinea II Pernyataan Kemerdekaan
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Alinea III Pernyataan Kemerdekaan
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya
Alinea IV Pembukaan UUD 1945
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tabel Pasal-Pasal Pembahasan Sidang PPKI 18 Agustus 1945

No.	Pasal-Pasal	Penjelasan
1.	Pasal 6, Alinea 1	Dari Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli
2.	Pasal 29 Ayat 1	Negara berdasar atas kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
3.	Pasal 4	Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, ditambah dengan kata-kata menurut UUD
4.	Pasal 4 Ayat 2	Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh 2 orang Wakil Presiden, diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden
5.	Pasal 5	Penambahan satu kalimat agar kedudukannya lebih jelas, yaitu Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
6.	Pasal 6 Ayat 2	Perubahan dari wakil-wakil menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain
7.	Pasal 7	Perubahan menyesuaikan dengan kalimat Presiden dan Wakil Presiden
8.	Pasal 8 Ayat 1 dan 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian kedua kalimat diganti dengan Wakil Presiden, kesatunya dihilangkan, dan seterusnya, sampai kalimat habis waktunya dihilangkan. • Ayat 2 dihilangkan
9.	Pasal 9	Perubahan menyesuaikan dengan kalimat Presiden dan Wakil Presiden
10.	Pasal 23 Ayat 3	Terkait Badan Pemeriksa Keuangan, ditambahkan satu kalimat mengenai, hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
11.	Pasal 24 Ayat 1	Ditambahkan menurut undang-undang
12.	Pasal 25	Dari syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang, diubah menjadi syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang
13.	Pasal 26	Peraturan mengenai peralihan berubah sama sekali

Pembahasan mengenai rancangan pembukaan dan UUD 1945 yang melahirkan kesepakatan bersama, berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 WIB dan dimulai kembali pada pukul 03.15 WIB. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandardinata memberikan pandangan agar dibahas mengenai Pasal 111 dalam aturan peralihan yang berbunyi “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Otto Iskandardinata juga mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi, dengan mengajukan nama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai calonnya. Semua peserta sidang menerima usulan ini secara aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945, yang mana didalam pembukaan UUD 1945 terkandung dasar Negara Pancasila, serta kepemimpinan nasional dalam diri Presiden dan Wakil Presiden.

C. Rangkuman

1. Tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, PPKI mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi
2. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur, mewakili kelompok non-Islam, bahwasanya mereka berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata pada pembukaan UUD (Piagam Jakarta)
3. Permasalahan mengenai tujuh kata dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit, dimana ini merupakan suatu pembuktian bahwa para pemimpin-pemimpin kita lebih mementingkan persatuan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan
4. Hasil sidang PPKI I berhasil mengesahkan pembukaan dan UUD 1945, serta menetapkan Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

D. Penugasan Mandiri

Setelah kalian mempelajari materi diatas, maka berikanlah jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini:

- 1) Mengapa bisa terjadi 3 versi pembukaan UUD 1945?
- 2) Buatlah perbandingan antara 3 versi pembukaan UUD 1945, kemudian lakukan identifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan antara 3 versi tersebut!
- 3) Tuliskan mengenai hasil Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945!

.....
.....
.....
.....

E. Latihan Soal

1. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang yang pernah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat lagi memenuhi janji tersebut, karena ...
 - A. Jepang sadar bahwa janji tersebut akan membahayakan posisi Jepang
 - B. Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia
 - C. Sekutulah yang nantinya akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia
 - D. Jepang mengulur-ngulur janji tersebut sampai Indonesia berhenti berharap
 - E. Indonesia menjadi sadar arti penting kemerdekaan dan menolak diberi kemerdekaan oleh Jepang

2. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip demokrasi. Hal ini tercermin dalam isi Pembukaan UUD 1945 yakni ...
 - A. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
 - B. perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
 - C. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
 - D. maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya
 - E. terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

3. Tujuh kata yang dihilangkan dalam Piagam Jakarta, sesuai aspirasi dari Indonesia Timur adalah ...
 - A. rakyat Inonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
 - B. Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya
 - C. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
 - D. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
 - E. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

4. Perhatikan pernyataan berikut !
 - 1) Pengesahan UUD 1945
 - 2) Penetapan 8 provinsi Indonesia
 - 3) Penetapan presiden dan wakil presiden
 - 4) Pembentukan KementerianHasil sidang PPKI 1 ditunjukkan pada angka ...
 - A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 2 dan 3
 - D. 2 dan 4
 - E. 3 dan 4

5. Perubahan rancangan UUD 1945 yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain adalah ...
 - A. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli
 - B. Presiden ialah orang Indonesia asli, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam
 - C. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang yang tinggal di Indonesia

- D. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, diubah menjadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.
 - E. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh 2 orang Wakil Presiden.
6. Dalam sidang PPKI I, diusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dan usulan ini diterima oleh semua peserta sidang. Tokoh yang memberi usulan tersebut adalah
- A. Mohammad Hatta
 - B. Otto Iskandardinata
 - C. Rajiman Widyodiningrat
 - D. Sukarno
 - E. Supomo
7. Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan yang mendukung kalimat tersebut adalah
- A. sidang PPKI I telah berhasil mengubah rancangan yang dihasilkan oleh BPUPKI yang merupakan bentukan Jepang.
 - B. hasil sidang PPKI I merupakan kesepakatan bersama antara tokoh-tokoh muda golongan tua.
 - C. sidang PPKI I menetapkan UUD 1945, yang terkandung dasar Negara Pancasila
 - D. sidang PPKI berhasil mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan cita-cita persatuan
 - E. Sukarno berhasil menambah 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

NO	KUNCI	PEMBAHASAN	SKOR
1.	B	Setelah kalah Perang Pasifik, Jepang yang pernah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat lagi memenuhi janji tersebut, karena Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia, yang berarti Jepang tidak bisa lagi mengubah status Indonesia	1
2.	E	prinsip demokrasi Indonesia dapat dilihat dalam kalimat terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menegaskan bahwa yang berdaulat/memerintah adalah rakyat.	1
3	B	Tujuh kata yang dihilangkan dalam Piagam Jakarta, sesuai aspirasi dari Indonesia Timur yang non Islam Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.	1
4	B	Hasil sidang PPKI 1 adalah pengesahan UUD 1945 dan penetapan presiden dan wakil presiden.	1
5	A	Perubahan rancangan UUD 1945 yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain : Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli	1
6	B	Dalam sidang PPKI I, diusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dan usulan ini diterima oleh semua peserta sidang. Tokoh yang memberi usulan tersebut adalah Otto Iskandardinata.	1
7	C	Dengan selesainya Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, berarti bahwa bangsa Indonesia telah memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam sidang ini berhasil ditetapkan UUD 1945, yang didalamnya terkandung dasar Negara Pancasila	1
JUMLAH SKOR MAKSIMAL			7

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMAL}} \times 100$$

$$= \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{7} \times 100$$

F. Penilaian Diri

Silahkan lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung. Isi jawaban secara jujur menggunakan tanda centrang (√) pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Apabila jawaban anda lebih banyak “Ya”, maka anda dapat lanjut ke materi berikutnya.. Namun jika jawaban ada lebih banyak “Tidak” maka anda harus mengulang kembali materi yang dianggap sulit.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya menyukai pembahasan materi PPKI I		
2.	Saya dapat menjelaskan perubahan – perubahan yang dihasilkan dalam Sidang PPKI I		
3.	Saya dapat mengidentifikasi pembentukan pemerintahan awal Indonesia pada sidang PPKI I		
4	Saya dapat menyimpulkan arti penting Sidang PPKI I bagi bangsa Indonesia		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

SIDANG PPKI II DAN III

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat melakukan penalaran mengenai kronologi Sidang PPKI II dan III, kemudian mampu menyajikan hasil penalarannya dalam bentuk lisan/tulisan/media lain.

B. Uraian Materi

1. Sidang PPKI II

PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno sempat membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil, yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah Negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Keanggotaan tim kecil ini diketuai oleh Otto Iskandardinata, dengan anggota Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Raden Arya Wiranatakusumah, A. A. Hamidan, Mohammad Amir, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Puja. Pada sidang II PPKI, tanggal 19 Agustus 1945 yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB, Sukarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk Departemen (Kementrian), tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya.

Pada kesempatan pertama sidang, Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 Provinsi beserta para calon Gubernurnya, dan perlu juga dibentuk Panitia Kebangsaan Daerah (Komite Nasional) untuk membantu tugas-tugas daerah. Mengenai kepolisian agar susunan di pusat dan daerah segera dipindahkan kedalam kekuasaan pemerintah Indonesia, dengan ditambah pimpinan dari bekas PETA dan pemimpin rakyat, serta diberikan petunjuk-petunjuk sikap baru terhadap rakyat. Lalu terkait tentara kebangsaan, panitia kecil ini menolak rencana pembelaan Negara yang diusulkan oleh Panitia BPUPK sebelumnya. Panitia kecil juga mengusulkan pembubaran PETA di Jawa dan Bali, laskar rakyat di Sumatera, pemberhentian Heiho, serta segera membentuk tentara kebangsaan Indonesia. Usulan-usulan yang disampaikan Otto Iskandardinata tersebut, diterima secara aklamasi oleh sidang, dengan beberapa catatan, seperti pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian yang akan dipersiapkan oleh Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, dan Otto Iskandardinata sendiri.

Tabel Pembagian Provinsi dan Gubernur awal Kemerdekaan

No.	Pembagian Provinsi	Gubernur
1.	Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
2.	Jawa Tengah	Raden Panji Suroso
3.	Jawa Timur	Raden Mas Suryo
4.	Kalimantan	Pangeran Mohammad Noer
5.	Sumatera	Teuku Mohammad Hasan
6.	Sulawesi	Sam Ratulangi
7.	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Puja
8.	Maluku	Johannes Latuharhary

Hal menarik lainnya, Otto Iskandardinata juga memaparkan tentang urusan rakyat, yaitu (1) pengumpulan bahan makanan dan pakaian untuk umum dikerjakan oleh badan dibawah Komite Nasional dengan pengawasan dari Kepala Daerah; (2) sementara waktu pengumpulan padi dari petani terpaksa harus dijalankan dengan dikurangkan jumlah pembagiannya dan dinaikan harga jualnya; (3) Zyugyo Bussi Koodan dan Syukuryo Kanri Kyoku yang menguasai bahan logistic agar diserahkan ke pemerintah Indonesia; (4) Kaum Romusha yang masih diperlukan tenaganya agar dirawat dengan baik, dan sisanya dikembalikan ketempatnya masing-masing; (5) dibentuk badan penerangan umum sebagai alat komunikasi dan informasi; (6) diadakan kantor pusat untuk menjalankan pemerintahan; (7) menjaga kesehatan masyarakat dengan menghimpun dan membagikan obat-obatan keseluruh daerah; (8) memberikan amnesti kepada para tahanan politik; (9) segera menetapkan harga uang; (10) alat-alat angkut dan perhubungan untuk kepentingan public diserahkan kepada pemerintah.

Setelah selesai pembahasan bagian pertama, agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13 Departemen, namun setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya 12 Departemen dan 1 Menteri Negara, ditambah 2 Ketua lembaga tinggi Negara, 1 Sekretaris Negara, dan 1 Jurubicara Negara. Adapun susunan Departemen pada awal kemerdekaan yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Raden Arya Wiranatakusumah	Menteri Dalam Negeri
2.	Ahmad Subarjo	Menteri Luar Negeri
3.	Prof. Supomo	Menteri Kehakiman
4.	Ir. Surachman	Menteri Kemakmuran
5.	Dr. Samsi	Menteri Keuangan
6.	Dr. Buntaran Martoatmojo	Menteri Kesehatan
7.	Ki Hajar Dewantara	Menteri Pengajaran
8.	Iwa Kusumasumanti	Menteri Sosial
9.	(Supriadi?)	Menteri Pertahanan
10.	Amir Syarifudin	Menteri Penerangan
11.	Abikusno Tjokrosuyoso	Menteri Perhubungan ad. Interim
12.	Dr. Amir	Menteri Negara
13.	Wahid Hasyim	Menteri Negara
14.	Sartono	Menteri Negara
15.	A.A. Maramis	Menteri Negara
16.	Otto Iskandardinata	Menteri Negara
17.	Dr. Kusuma Atmaja	Ketua Mahkamah Agung
18.	Gatot	Ketua Jaksa Agung
19.	Abdul Gaffar Pringgodigdo	Sekretaris Negara
20.	R. Sukarjo Wiryopranoto	Jurubicara Negara

2. Sidang PPKI III

Pukul 14.55 WIB, tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI II berakhir. Sebelum kembali kerumah, Sukarno dan Hatta diminta mengikuti rapat bersama para pemuda di Jalan Prapatan 10. Hadir dalam rapat itu selain Sukarno dan Hatta, yaitu Adam Malik, Kasman Singodimejo, Ki Hajar Dewantara, dan Sutan Sjahrir. Terjadi perdebatan ketika Sukarno menolak desakan para pemuda agar segera merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam rapat itu, Adam Malik

sempat menyampaikan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang diisi oleh para bekas PETA dan Heiho. Sebelum rapat bubar, dekrit ini ditanggapi oleh Sukarno sambil meminta waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Pada malam hari ditanggal yang sama, bertempat di Jalan Gambir Selatan 10, diadakan rapat antara Sukarno, Mohammad Hatta, Sartono, Suwiryo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wiryopranoto, Buntaran Martoatmojo, Abdul Gaffar Pringgodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Tajuluddin, untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional. Rapat malam itu memutuskan bahwa anggota Komite Nasional berjumlah 60 orang, dengan rapat perdana direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi, Pasar Baru.

Sampai akhirnya sidang PPKI III dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan melibatkan para pemuda. Dalam sidang, Chairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Para pemuda juga mendesak agar pemerintah segera membentuk tentara nasional. Pada akhirnya akomodasi berhasil diperoleh melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan PPKI setelah bubar kemudian berganti wujud perjuangan melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hasil lainnya adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia.

C. Rangkuman

1. Tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil, yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah Negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian
2. Panitia 9 terdiri dari Otto Iskandardinata, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Raden Arya Wiranatakusumah, A. A. Hamidan, Mohammad Amir, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Puja.
3. Sukarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk Departemen (Kementrian), tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk didalamnya.
4. Sidang PPKI II memutuskan membentuk 8 Provinsi dengan masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur
5. Sidang PPKI II memutuskan adanya 12 Departemen dan 1 Menteri Negara, ditambah 2 Ketua lembaga tinggi Negara, 1 Sekretaris Negara, dan 1 Jurubicara Negara

G. Penugasan Mandiri

1. Setelah kalian mempelajari materi diatas, berikan pandangan kalian, mengapa para pemuda begitu aktif menekan Sukarno dan Mohammad Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang?

.....

.....

.....

.....

2. Setelah kalian mempelajari materi mengenai pembagian Provinsi dan Departemen pada awal kemerdekaan, apabila dikaitkan dengan masa sekarang, maka terjadi penambahan jumlah Provinsi dan Departemen.
 - 1) Buatlah perbandingan antara jumlah Provinsi pada awal kemerdekaan dengan jumlah Provinsi pada masa sekarang!
 - 2) Buatlah perbandingan antara jumlah Departemen pada awal kemerdekaan dengan jumlah Departemen pada masa sekarang!
 - 3) Sepakatkah anda dengan wacana perampingan jumlah Departemen dan pengurangan jumlah Provinsi di masa sekarang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Latihan Soal

Kerjakan soal berikut secara mandiri dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat !

- Dalam sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Tim ini diketuai oleh... .
 - Ahmad Subarjo
 - Iwa Kusumasumantri
 - Mohammad Amir
 - Otto Iskandardinata
 - Sayuti Melik

- Penetapan provinsi beserta gubernurnya yang benar adalah

	Provinsi	Gubernur
A	Jawa Barat	Pangeran Mohammad Noer
B	Sulawesi	Sutarjo Kartohadikusumo
C	Jawa Timur	Raden Mas Suryo
D	Kalimantan	Raden Panji Suroso
E	Jawa Tengah	Sam Ratulangi

- Selain menetapkan provinsi dan gubernurnya, Sidang PPKI II juga menetapkan ...
 - presiden dan wakil presiden
 - susunan departemen
 - susunan tentara kebangsaa
 - kepolisian negara Indonesia
 - badan penerangan umum
- Pembentukan BKR adalah hasil sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal
 - 18 Agustus 1945
 - 19 Agustus 1945
 - 20 Agustus 1945
 - 21 Agustus 1945
 - 22 Agustus 1945
- PPKI dibubarkan pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, dan berganti nama menjadi
 - Parta Nasional Indonesia
 - Komite Perjuangan Indonesia
 - Parta Perjuangan Indonesia
 - Komite Nasional Indonesia Pusat
 - Badan Perjuangan Nasional

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

NO	KUNCI	PEMBAHASAN	SKOR
1.	D	Panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan diketuai oleh Otto Iskandardinata	1
2.	C	Gubuernur yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 1945 antara lain Gubernur Jawa Timur yakni Raden Mas Suryo	1
3	B	Selain menetapkan provinsi dan gubernurnya, Sidang PPKI II juga menetapkan susunan departemen	1
4	E	Pembentukan BKR adalah hasil sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945	1
5	D	PPKI dibubarkan pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, dan berganti nama menjadi KNIP	1
JUMLAH SKOR MAKSIMAL			5

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMAL}} \times 100$$

$$= \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{5} \times 100$$

5

E. Penilaian Diri

Silahkan lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung. Isi jawaban secara jujur menggunakan tanda centrang (√) pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Apabila jawaban anda lebih banyak “Ya”, maka anda dapat lanjut ke materi berikutnya.. Namun jika jawaban ada lebih banyak “Tidak” maka anda harus mengulang kembali materi yang dianggap sulit.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya menyukai pembahasan materi PPKI II dan III		
2.	Saya dapat mengidentifikasi pembentukan pemerintahan Indonesia pada hasil sidang PPKI II		
3	Saya dapat mengidentifikasi pembentukan pemerintahan Indonesia pada hasil sidang PPKI III		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

KNIP MENATA DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PEMERINTAHAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat melakukan penalaran mengenai pembentukan dan perkembangan KNIP, kemudian mampu menyajikan hasil penalarannya dalam bentuk lisan/tulisan/media lain.

B. Uraian Materi

KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, sebagai pengejawantahan dari hasil Sidang PPKI I dan III, serta aturan peralihan UUD 1945 Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Nasional. KNIP sebagai badan pembantu Presiden yang keanggotaannya diisi oleh para tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI, diketuai oleh Kasman Singodimejo. Pada awal kepengurusan, KNIP sempat melakukan sidang Komite Nasional tanggal 23-29 Agustus 1945, namun belum mampu menghasilkan sesuatu yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tiga hal: (1) minimnya pengalaman dalam penyelenggaraan legislasi; (2) terjadinya dualisme dalam bidang eksekutif; (3) adanya tekanan politik dari kelompok Sjahrir.

Pada rapat KNIP tanggal 16-17 Oktober 1945, Sjahrir dan kelompoknya mengajukan usul untuk mengubah kedudukan dan tugas KNIP. Usul ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tentang (1) sebelum DPR/MPR terbentuk, KNIP disertai kekuasaan legislative untuk membuat undang-undang dan menetapkan GBHN; (2) dalam menjalankan tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja (BP-KNIP) yang diketuai Sutan Sjahrir; (3) Komite Nasional disusun dari pusat (KNIP) sampai tingkat daerah (Komite Nasional Indonesia). Tanggal 17 Oktober 1945 atas permintaan dari Sarmidi Mangunsarkoro, Sukarni, dan Subadio mewakili delegasi yang dibentuk pemerintah, Sjahrir akhirnya mau diajak bergabung dalam KNIP. Pada masa sekarang KNIP identik dengan DPR, oleh karena itu tanggal 29 Agustus 1945 yang menjadi momentum dibentuknya KNIP, dijadikan sebagai hari lahirnya DPR.

Tabel Kepengurusan KNIP dan BP KNIP

Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat	
Kasman Singodimejo	Ketua
Sutarjo Kartohadikusumo	Wakil Ketua I
Johannes Latuharhary	Wakil Ketua II
Adam Malik	Wakil Ketua III
Jumlah anggota 137 orang	
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat	
Sutan Sjahrir	Ketua
Supeno	Penulis
Jumlah anggota 15 orang	



Sutan Sjahrir membuka sidang KNIP I di Jakarta, 16 Oktober 1945

Setelah bergabung di KNIP, Sjahrir segera menyusun haluan Negara yang menggambarkan kedudukan RI sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri dan menjadi Negara demokratis. Untuk merealisasikan haluan Negara ini, Sjahrir menyampaikan usulan kepada pemerintah tentang politik dalam dan luar negeri yang direspon melalui terbitnya Manifesto Politik oleh pemerintah, tanggal 1 November 1945, ditandatangani oleh Mohammad Hatta. Suasana demokratis menemukan bentuk setelah terbit Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Hal ini membuat gagasan partai tunggal yang pernah diajukan Sukarno saat sidang PPKI III harus terkubur dalam, apalagi sebelumnya, setelah didirikan pada tanggal 27 Agustus 1945, hanya berselang 4 hari, ditanggal 1 September 1945, PNI dibubarkan karena khawatir terjadi persaingan dengan KNIP. KNIP terus melanjutkan kerjanya dalam menata sistem pemerintahan, tanggal 11 November 1945, Sjahrir mengajukan Maklumat KNIP No. 5 mengenai pembentukan kabinet dengan susunan Menteri yang bekerja kolektif dibawah pimpinan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat (KNIP). Pemerintah akhirnya menyetujui terbitnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer.

C. Rangkuman

1. KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, sebagai pengejawantahan dari hasil Sidang PPKI I dan III, serta aturan peralihan UUD 1945 Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Nasional.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer

D. Penugasan Mandiri

Setelah kalian mempelajari materi diatas, kalian bisa melihat perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang dihasilkan dari kerja KNIP. Hal ini dibuktikan melalui terbitnya beberapa Maklumat yang diterbitkan oleh pemerintah. Berikan penjelasan mengenai latar belakang dibalik terbitnya Maklumat-Maklumat pemerintah tersebut!

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar

1. KNIP secara resmi dibentuk pada tanggal
 - A. 18 Agustus 1945
 - B. 19 Agustus 1945
 - C. 23 Agustus 1945
 - D. 27 Agustus 1945
 - E. 29 Agustus 1945

2. Awal pembentukannya, KNIP diketuai oleh
 - A. Adam Malik
 - B. Kasman Singodimejo
 - C. Supeno
 - D. Sutarjo Kartohadikusumo
 - E. Sutan Sjahrir

3. Rencana pembentukan PNI sebagai partai tunggal batal terbentuk dengan terbitnya
 - A. Maklumat Wakil Presiden No. X
 - B. Maklumat KNIP No.5 tahun 1945
 - C. Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945
 - D. Maklumat tanggal 3 November 1945
 - E. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

4. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidentil ke sistem parlementer ditandai dengan terbitnya
 - A. Maklumat Wakil Presiden No. X
 - B. Maklumat KNIP No.5 tahun 1945
 - C. Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945
 - D. Maklumat tanggal 3 November 1945
 - E. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

5. Pada masa sekarang KNIP identik dengan lembaga
 - A. MPR
 - B. DPR
 - C. BPK
 - D. MA
 - E. BPK

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

NO	KUNCI	PEMBAHASAN	SKOR
1.	E	KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, sebagai pengejawantahan dari hasil Sidang PPKI I dan III, serta aturan peralihan UUD 1945 Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Nasional	1
2.	B	Dalam susunan pengurus, ketua KNIP adalah Kasman Singodimejo	1
3	D	Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Pembentukan partai-partai (banyak partai) berarti membatalkan rencana pembentukan PNI sebagai partai tunggal	1
4	E	Perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidetil ke sistem parlementer ditandai dengan terbitnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945	1
5	B	Pada masa sekarang KNIP identik dengan lembaga DPR, sehingga tanggal terbentuknya KNIP diambil sebagai hari lahirnya DPR	1
JUMLAH SKOR MAKSIMAL			5

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMAL}} \times 100$$

$$= \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{5} \times 100$$

F. Penilaian Diri

Silahkan lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung. Isi jawaban secara jujur menggunakan tanda centrang (√) pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Apabila jawaban anda lebih banyak “Ya”, maka anda dapat lanjut ke materi berikutnya.. Namun jika jawaban ada lebih banyak “Tidak” maka anda harus mengulang kembali materi yang dianggap sulit.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya menyukai pembahasan materi KNIP		
2.	Saya dapat menjelaskan fungsi dan tugas KNIP		
3	Saya dapat mengidentifikasi hasil-hasil pembahasan KNIP berkaitan tata kelola pemerintahan		
4	Saya mengerjakan soal-soal tahanan dengan mandiri dan jujur		

EVALUASI

A. Petunjuk Soal

- Sekarang Anda persiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi!
- Tuliskan jawaban dalam bentuk esai/infografis/mindmapping/media lain secara kreatif, jelas, dan benar.
- Jika Anda mengalami kesulitan, pelajari kembali materinya atau diskusikan dengan teman dan guru Anda. Selamat mengerjakan!

B. Soal – Soal

1. Berikan pandangan anda mengenai proklamasi yang digaungkan pada masa status quo diperalihan dari Pendudukan Jepang ke Penguasaan Sekutu!
2. Buatlah rekonstruksi mengenai kronologi jalannya Sidang PPKI I
3. Jelaskan arti penting sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
4. Buatlah identifikasi mengenai pemikiran para pendiri bangsa yang tergabung PPKI dalam jalannya sidang PPKI II, dan III!
5. Tuliskan masing-masing dua keputusan penting Sidang PPKI I, II, dan III !
6. Jelaskan mengenai dua maklumat yang berkaitan perubahan dalam tata pemerintahan yang berasal dari kinerja KNIP!

KUNCI JAWABAN

NO	KRITERIA/KUNCI JAWABAN /SKOR	JUMLAH SKOR
1.	Pandangan berkaitan Proklamasi pada masa status quo <ul style="list-style-type: none"> - kesempatan emas bagi bangsa Indoneia (0-2) - kemerdekaan bukan diberikan oleh Jepang, melainkan upaya bangsa Indoneia sendiri (0-2) 	2
2.	Rekonstruksi kronologi Jalannya sidang PPKI I <ul style="list-style-type: none"> - Waktu sidang (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - Pembahasan (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - Hasil/keputusan sidang (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) 	6
3	Arti penting sidang PPKI I Dengan Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945, (0-2) yang mana didalam pembukaan UUD 1945 terkandung dasar Negara Pancasila, serta kepemimpinan nasional dalam diri Presiden dan Wakil Presiden (0-2)	4
4	Pemikiran para pendiri bangsa dalam sidang PPKI II dalam panitia kecil, ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah Negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian, (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) Sukarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk Departemen (Kementrian) (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) <ul style="list-style-type: none"> - Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 Provinsi beserta para calon Gubernurnya, (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - Otto Iskandardinata juga memaparkan tentang urusan rakyat, - dll Sidang PPKI III <ul style="list-style-type: none"> - Adam Malik sempat menyampaikan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang diisi oleh para bekas PETA dan Heiho (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - Chairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - pembentukan Partai Nasional Indonesia. (tidak tepat = 0, kurang tepat = 1, tepat = 2) - dll 	4

NO	KRITERIA/KUNCI JAWABAN /SKOR	JUMLAH SKOR
5	<p>Hasil sidang PPKI I, II dan III</p> <p>Hasil Sidang PPKI I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan UUD 1945 (skor 1) 2. Penetapan presiden dan wakil presiden (skor 1) 3. pembentukan komite nasional (skor 1) <p>Hasil sidang PPKI II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian provinsi dan gubernurnya (skor 1) 2. pembentukan departmen/kementerian (skor 1) 3. pembentukan komite nasional daerah (skor 1) <p>Hasil sidang PPKI III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan BKR (skor 1) 2. pembentukan PNI (skor 1) 3. pembentukan KNIP (skor 1) 	6
6	<p>Dua perubahan dalam kinerja KNIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Wakil Presiden No. X (skor 1) tentang (1) sebelum DPR/MPR terbentuk, KNIP disertai kekuasaan legislative untuk membuat undang-undang dan menetapkan GBHN; (2) dalam menjalankan tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja (BP-KNIP) yang diketuai Sutan Sjahrir; (3) Komite Nasional disusun dari pusat (KNIP) sampai tingkat daerah (Komite Nasional Indonesia). (skor 2) 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 (skor1) mengenai anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat (skor 2) 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (skor 1) tentang perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. (skor 2) 	4
Total Skor		24

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMAL}} \times 100$$

$$= \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{24} \times 100$$

DAFTAR PUSTAKA

Isnaeni, F. Hendri. 2015. *Seputar Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Penerbit Buku Kompas

Notosusanto, Nugroho, Marwati Djoened Pusponogoro. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

----- 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Modul Bahan Ajar Workshop Guru Sejarah Mata Pelajaran Sejarah Tingkat SMA Kelas XII*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pengayaan Materi Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.